



Hutan perempuan di Provinsi Papua
Foto: Zulkifli-NGI

DALAM EDISI BULAN INI

- 01 FORCLIME dukung Pokja PUG dalam pengarusutamaan gender di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 02 Koordinasi pelaksanaan FORCLIME 4.0 dengan Balitbangda Provinsi Papua Barat
- 03 Koordinasi pelaksanaan FORCLIME 4.0 dengan Balai Litbang LHK Manokwari
- 04 FORCLIME berkoordinasi dengan Gugus Tugas Masyarakat Adat tentukan kampung percontohan di Papua
- 05 Rapat koordinasi bersama Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua
- 06 FORCLIME siap dukung kegiatan kemitraan konservasi di Papua

Editorial

Dalam edisi bulan Agustus ini, newsletter FORCLIME menyajikan artikel tematik terkait dengan dukungan FORCLIME terhadap pengarusutamaan gender di sektor kehutanan melalui Pokja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dukungan dimaksud telah dimulai sejak tahun 2013 dalam bentuk dukungan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pokja PUG. FORCLIME juga mendukung upaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendapatkan penghargaan Presiden, yaitu 'Anugerah Parahita Ekapraya' atas pembangunan kehutanan yang responsif gender. Anugerah ini merupakan bentuk pengakuan atas pencapaian KLHK dalam mengintegrasikan PUG dalam kegiatan pembangunan kehutanan.

Artikel lain yang ditampilkan dalam edisi bulan Agustus ini terkait dengan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan kegiatan FORCLIME 4.0 di Tanah Papua. Artikel dimaksud, diantaranya pertemuan koordinasi dengan Balitbangda Provinsi Papua Barat dan Balai Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Manokwari. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan masukan terkait dengan lokasi

potensial untuk dijadikan kampung percontohan (*pilot village*). Untuk mendapatkan dukungan 'adat', FORCLIME juga melakukan pertemuan koordinasi dengan Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA). Dalam upaya mengefektifkan implementasi kegiatan yang sejalan dengan rencana prioritas pembangunan kehutanan di Provinsi Papua, FORCLIME mengadakan pertemuan koordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua. Selanjutnya, untuk mengnyinergikan kegiatan kemitraan konservasi, FORCLIME berkoordinasi dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam.

Melalui koordinasi yang dilakukan, diharapkan terjadi sinergi kegiatan sehingga manfaat kerja sama dapat diperoleh dan dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat.



Mohammad Rayan

Advisor teknis lintas bidang dan pengelolaan konflik

FORCLIME dukung Pokja PUG dalam pengarusutamaan gender di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Penerbitan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, menjadi langkah baru bagi badan dan kementerian untuk mengupayakan PUG dalam rangka mendorong terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender. PUG merupakan strategi untuk mengintegrasikan gender kedalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan, untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan.

Dalam pelaksanaannya, semua institusi pemerintah diharapkan dapat mengupayakan tujuh persyaratan PUG, yaitu: Komitmen, Kebijakan, Kelembagaan, Sumber Daya, Data Terpilah, Sarana dan Prasarana, dan Dukungan Masyarakat. Setiap dua tahun, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) melakukan penilaian terhadap pencapaian dari pemenuhan ke-7 persyaratan PUG tersebut. Hasil penilaian terhadap pencapaian dalam pemenuhan kriteria tersebut menjadi dasar dalam pemberian penghargaan yang dikenal dengan 'Anugerah Parahita Ekapraya (APE)'.
FORCLIME (*Forests and Climate Change Programme*), program kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Federal Jerman, mempunyai mandat untuk mendukung prioritas pembangunan Indonesia sesuai dengan hasil

negosiasi antar pemerintah, termasuk pelaksanaan Agenda Internasional, diantaranya PUG. Sesuai dengan mandat yang diemban, dalam pelaksanaan kegiatannya, FORCLIME bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Salah satu program yang didukung adalah pelaksanaan penerapan PUG di sektor kehutanan. Dukungan yang diberikan oleh FORCLIME adalah membantu Pokja PUG KLHK untuk melaksanakan program dan kegiatannya sesuai kemampuan program. Dukungan tersebut telah dan sedang dilakukan sejak tahun 2013 dalam upaya pemenuhan persyaratan PUG dan mengimplementasikannya pada semua tingkatan.

Dukungan FORCLIME

Dalam periode 2013- 2018, FORCLIME mendukung Pokja PUG dengan menyediakan tenaga ahli dan pelaksanaan pertemuan-pertemuan di lingkup KLHK. Selain itu, juga turut mendukung pelaksanaan beberapa pelatihan, seperti Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), penyusunan *Gender Budget Statement*, audit terhadap pelaksanaan PPRG, revisi Peraturan Menteri No. P. 31/MenLHK/SETJEN/SET.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG bidang LHK. Di tingkat tapak, dukungan diberikan dalam pembangunan Model Kegiatan Gender, yaitu di Agam (Sumatera Barat) dan Sumba Timur (NTT) serta di wilayah kerja FORCLIME, yaitu di Kabupaten Berau, Malinau dan Kapuas Hulu, termasuk Pelatihan PPRG bagi widyaiswara Badan Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Makassar.



Foto: Arsip Pokja PUG



Foto: Arsip Pokja PUG

Pokja PUG KLHK dengan dukungan, diantaranya dari FORCLIME, telah berhasil mendapatkan beberapa penghargaan yang terus meningkat, yaitu:

- Anugerah Parahita Pratama pada tahun 2011
- Anugerah Parahita Madya pada tahun 2012 dan tahun 2013
- Anugerah Parahita Ekapraya Utama pada tahun 2015 dan 2016
- Anugerah Parahita Ekapraya Mentor pada tahun 2018 yang merupakan penghargaan tertinggi dalam implementasi PUG di institusi pemerintah.

Berkaitan dengan keterlibatan FORCLIME dalam pelaksanaan PUG di KLHK, pada tahun 2018, FORCLIME dimasukkan sebagai anggota dalam Pokja PUG KLHK sesuai dengan Keputusan No. 45/Setjen/Rocan/Set.1/9/2018.

Dalam periode 2019 – 2020, FORCLIME terus mendukung Pokja PUG dengan menyediakan tenaga ahli dan mendukung beberapa pertemuan Pokja PUG lingkup KLHK. Kegiatan dimaksud, antara lain lokakarya

Pengarusutamaan Gender dalam Program Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penyediaan tenaga ahli di Forum Diskusi PUG dengan tema: “Menuju RPJMN KLHK tahun 2020 – 2024 Responsif Gender”. Diskusi yang diadakan di Jakarta ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan terkait arah dan strategi KLHK dalam pelaksanaan PUG agar dapat diintegrasikan ke dalam kelembagaan dan program. Dalam acara tersebut juga dilakukan peluncuran buku “Inspirasi dari Alam” yang berisi uraian 20 tahun perjalanan PUG KLHK. Dukungan yang diberikan FORCLIME adalah menyediakan tenaga ahli dalam penulisan buku tersebut. Selain itu, FORCLIME juga mendukung pencetakan buku resume Gelar Lomba Inovasi Pelaksanaan PUG KLHK tahun 2020 yang diberi judul “Merakit Sinergi Kesetaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan” dan berisi praktik terbaik dan hasil kegiatan PUG bidang LHK oleh seluruh eselon I. Kegiatan lain yang didukung FORCLIME pada tahun 2020 adalah penyusunan *Roadmap* Pelaksanaan PUG di KLHK 2020-2024 dan penyusunan *policy brief* Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kementerian LHK.



Menteri LHK Siti Nurbaya saat terima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya 2018 dari Wapres Jusuf Kalla. Foto: Humas KLHK

f t i @jpncom



Foto Koleksi FORCLIME oleh M. Rayan

Dukungan FORCLIME 4.0

Setelah berakhirnya FORCLIME phase 3 di akhir tahun 2020, program kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federasi Jerman di bidang pembangunan kehutanan dan mitigasi perubahan iklim berlanjut dengan disetujuinya program FORCLIME 4.0. Seperti sebelumnya, FORCLIME 4.0 didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) dan dilaksanakan oleh GIZ

bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menunjuk Biro Perencanaan sebagai *Project Executing Agency* (PEA).

Seperti sebelumnya, program FORCLIME 4.0 mendukung Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini KLHK dalam pengembangan kebijakan, pengembangan kapasitas, dan implementasi praktik manajemen terbaik untuk pengelolaan hutan lestari serta upaya konservasi keanekaragaman hayati. Fokus



Sumber: Buku Inspirasi dari Alam

area FORCLIME 4.0 mencakup provinsi Sulawesi Tengah, Papua Barat dan Papua, dengan durasi program Januari 2021-Desember 2023. Implementasi program FORCLIME dilakukan melalui pendampingan di tingkat Pusat (KLHK), di tingkat provinsi (dinas kehutanan) dan di tingkat lapangan (KPH dan masyarakat).

Dukungan kepada Pokja PUG akan dilanjutkan dengan mendukung dan memberikan pertimbangan dalam penyusunan, revisi, dan penerapan kebijakan dan peraturan terkait gender.

Pada tahun 2021, Pokja PUG KLHK meluncurkan Sistem Pembelajaran Gender (SRAGEN) yang merupakan platform pembelajaran digital terkait gender pada tanggal 25 Maret 2021. Platform tersebut terdiri dari beberapa produk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) gender, yaitu situs PUG, kumpulan *policy brief* PUG dari seluruh Eselon I di KLHK dan beberapa kanal media sosial gender seperti YouTube, Instagram, Facebook dan Twitter. Terkait dengan hal tersebut, FORCLIME melanjutkan dukungannya dengan menyediakan tenaga ahli untuk mengelola dan update data platform SRAGEN serta mendukung pelaksanaan program *Gender Leadership* yang diluncurkan pada Juni – November 2021.



Langkah Berikutnya

FORCLIME 4.0 akan terus mendukung Pokja PUG KLHK dalam implementasi pengarusutamaan gender dengan fokus penekanan kebersinambungan pengarusutamaan gender melalui kebijakan dan monitoring serta evaluasi.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

[Mohammad Rayan](#), Advisor teknis lintas bidang dan pengelolaan konflik



Sumber: Buku Inspirasi dari Alam

Koordinasi pelaksanaan FORCLIME 4.0 dengan Balitbangda Provinsi Papua Barat

21 Juni 2021



Sebagai tindak lanjut lokakarya perencanaan program FORCLIME 4.0 di Papua Barat, tim FORCLIME melaksanakan pertemuan koordinasi bersama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Papua Barat selaku anggota Tim Pengarah Program FORCLIME 4.0 pada tanggal 21 Juni 2021 di Manokwari, Papua Barat. Pertemuan dihadiri juga oleh perwakilan dari Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Koordinasi ini bertujuan untuk mendapatkan arahan Balitbangda Provinsi Papua Barat terkait pelaksanaan FORCLIME 4.0, serta mendapatkan informasi dan memahami kegiatan dan aktivitas yang telah dan akan dilaksanakan di Provinsi Papua Barat oleh pemerintah dan mitra-mitra pembangunan. Dalam pertemuan tersebut dibahas tiga poin utama, yaitu persiapan Simposium Internasional Flora Malesiana ke-12 di Manokwari, pembangunan museum dan pusat penelitian terkait keanekaragaman hayati, dan penyampaian informasi program doktoral yang merupakan kerja sama Universitas Indonesia dan Universitas of Freiburg Jerman tentang *Basic Income*.

Pelaksanaan Simposium Internasional Flora Malesiana merupakan kesempatan bagi FORCLIME untuk berbagi informasi terkait Studi Kesenjangan Mekanisme Bagi Hasil (*Access and Benefit Sharing*). Saat ini, FORCLIME yang diwakili oleh Nita Yohana telah dilibatkan dalam Kelompok Kerja (Pokja) Simposium Internasional Flora Malesiana ke-12. Wacananya, FORCLIME akan diberikan satu *venue* dalam acara tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

[Nita Yohana](#) Advisor bidang pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua Barat

[Melanesia Brigitte Boseran](#), Advisor Junior bidang pengelolaan dan konservasi hutan, Papua Barat

[Mohammad Sidiq](#), Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Koordinasi pelaksanaan FORCLIME 4.0 dengan Balai Litbang LHK Manokwari

21 Juni 2021



Salah satu kegiatan dalam Rencana Strategis FORCLIME 4.0 adalah mendukung pengembangan komoditas sagu dan massoi bersama Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Litbang LHK) Manokwari melalui program agroforestri dan pendampingan pada kampung binaan. Oleh karena itu, Tim FORCLIME melaksanakan koordinasi dengan Balai Litbang LHK Manokwari pada tanggal 21 Juni 2021 di Manokwari, Papua Barat. Pertemuan dihadiri juga oleh perwakilan dari Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pada pertemuan koordinasi tersebut, dibahas beberapa potensi kolaborasi dalam mengimplementasikan kegiatan FORCLIME 4.0, diantaranya melalui pelibatan LSM dan sektor swasta, atau melalui dukungan diseminasi hasil riset yang dihasilkan oleh Balai Litbang LHK Manokwari. Sebagai tindak lanjut, tim FORCLIME di Papua Barat akan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Papua Barat, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Tambrau dan KPHP Sorong Selatan untuk mengidentifikasi desa binaan potensial beserta jenis komoditas yang dimiliki.

"Kehadiran FORCLIME di Papua Barat merupakan suatu kehormatan bagi kami, dan kami mau bekerja sama untuk mendukung program-program yang akan dikerjakan di Papua Barat", kata Bapak Pudja Mardi Utomo, Peneliti di Balai Litbang LHK Manokwari.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

[Nita Yohana](#) Advisor bidang pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua Barat

[Melanesia Brigitte Boseran](#), Advisor Junior bidang pengelolaan dan konservasi hutan, Papua Barat

[Mohammad Sidiq](#), Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

FORCLIME berkoordinasi dengan Gugus Tugas Masyarakat Adat tentukan kampung percontohan di Papua

21 Juni 2021



Dalam rangka untuk mendapatkan masukan terutama terkait lokasi-lokasi yang potensial untuk dijadikan kampung percontohan (*pilot village*) FORCLIME melakukan pertemuan koordinasi dengan Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA) pada tanggal 22 Juni 2021 di Jayapura, Provinsi Papua. Pertemuan tersebut dibuka oleh Asisten I Setda Kabupaten Jayapura, sebagai Ketua GTMA, bapak Abdul Rahman Basri, S.Sos, M.KP.

Di Kabupaten Jayapura, GTMA bekerja sama dengan mitra pembangunan lainnya telah melakukan pemetaan dan pembinaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di wilayah

Kabupaten Jayapura. Kegiatan pemetaan yang dilakukan oleh GTMA tersebut meliputi: pemetaan wilayah adat Buyaka (pinggiran Danau Sentani), wilayah adat Oktim (meliputi Unurumguay, Kaureh, Yapsi, dan Airum), wilayah adat Dmutru (Nimboran, Elseng di Distrik Kemtuk dan Kemtuk Gresi), wilayah adat Imbinumbay (Distrik Rafinerara yang berbatasan dengan Kota Jayapura) dan wilayah adat Yewena Yonsu (Distrik Depapre di kampung Tablasupa dan Tablanusu). Selain itu,

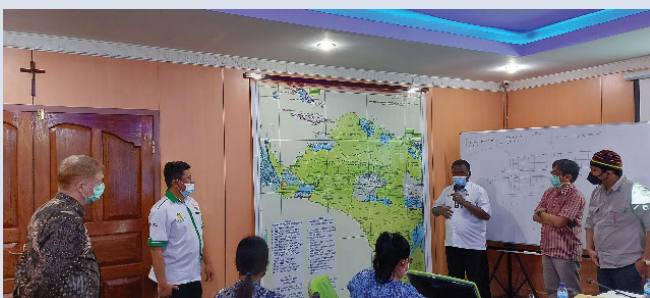
GTMA bekerja sama dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua dan Pemda Kabupaten Jayapura telah berhasil menggugah 11 kampung di wilayah Nimbokrang yang kemudian menandatangani kesepakatan untuk menjadikan wilayah mereka sebagai hutan Konservasi Adat.

Tindak lanjut dari pertemuan koordinasi tersebut adalah mengidentifikasi dan menentukan lokasi kampung percontohan FORCLIME yang akan mengembangkan program perhutanan sosial. Penentuan lokasi juga memperhatikan aspek kesiapan lokasi, yang ditandai dengan adanya keterlibatan aktif pihak lain seperti CDK Jayapura dalam mendorong kegiatan tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

[Rut Ohoiwutun](#), Junior Advisor, Hutan masyarakat dan hutan adat
[Theodora F. Resubun](#), Advisor, Pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua

Rapat koordinasi bersama Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua



Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua bersama FORCLIME mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 23 Juni 2021 untuk membahas implementasi kegiatan FORCLIME yang bersinergi dengan rencana pembangunan kehutanan di Provinsi Papua. Dalam rapat koordinasi tersebut FORCLIME melakukan *expose* Rencana Strategis FORCLIME 4.0 yang telah ditandatangani oleh Kepala Biro Perencanaan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai *Project Executing Agency* FORCLIME.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Jan Jap L. Ormuseray SH, M.Si., berkata “Rencana Program FORCLIME 4.0 sejalan

dengan rencana strategis dinas kehutanan dan sesuai dengan visi pembangunan kehutanan di Papua, yaitu “Hutan Lestari–Masyarakat Sejahtera”. Diharapkan program-program yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat bagi kelestarian hutan dan bagi masyarakat”, tambahnya.

Sebagai tindak lanjut, Tim FORCLIME 4.0 Papua akan melakukan koordinasi dengan bidang terkait untuk menyinkronkan program kerja prioritas tahun 2021. Selain itu, Tim juga mulai mengidentifikasi dan merencanakan kunjungan lapangan ke kampung binaan potensial yang akan menjadi kampung pilot FORCLIME 4.0 di Papua.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

[Theodora F. Resubun](#), Advisor, Pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua
[Mohammad Sidiq](#), Manajer bidang strategis, Pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat

FORCLIME siap dukung kegiatan kemitraan konservasi di Papua

23 Juni 2021



Dalam rangka menindaklanjuti diskusi informal sebelumnya, FORCLIME dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 23 Juni 2021 di Jayapura, Provinsi Papua. Pertemuan yang dipimpin oleh Kepala BBKSDA Papua, bapak Edward Sembiring, S.Hut., M.Si., bertujuan untuk bersinergi dalam kegiatan kemitraan konservasi di wilayah BBKSDA Papua. Saat ini ada 14 kelompok kemitraan konservasi yang sudah dibentuk di wilayah KPHK Cyloop – Youtefa. Kegiatan yang dilakukan sesuai potensi yang ada di masyarakat, selain itu, kelompok tersebut telah disahkan oleh kepala kampung. Kegiatan kemitraan konservasi diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap ekonomi masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, diusulkan dua kelompok yang diharapkan mendapatkan dukungan FORCLIME, yaitu:

Kampung binaan di Tablasupa terkait dengan kegiatan ekowisata dan juga produksi hiasan cenderawasih imitasi untuk dijadikan souvenir PON XX.

Kelompok binaan di Dosay untuk pengembangan angrek. Selain itu kelompok ini juga potensial untuk pengembangan budidaya lebah madu.

Selain itu, rapat koordinasi juga membahas kampung binaan yang akan diidentifikasi sebagai kampung percontohan (*pilot village*) FORCLIME 4.0. Yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan kunjungan lapangan.

“BBKSDA senang bekerja sama dengan FORCLIME, bisa saling bersinergi sehingga bisa membuka peluang BBKSDA untuk bekerja sama dengan berbagai pihak. Kerja sama ini dilakukan untuk menuju kemandirian masyarakat agar berproduksi tanpa merusak hutan, “Masyarakat Sejahtera, Hutan Lestari””, kata pak Edward Sembiring, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

[Theodora F. Resubun](#), Advisor pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua

[Mohammad Sidiq](#), Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat

FORCLIME Kerja Sama Teknis (TC) adalah program yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan GIZ, dan didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ).

Alamat FORCLIME: Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Blok 7 lantai 6. Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat 10270
T: +62 (0)21 572 0212, +62 (0)21 572 0214
www.forclime.org
Surel korespondensi: ratu.widyawati@giz.de